

TESIS

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP
PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PESERTA
PEMILIHAN UMUM**



Disusun Oleh:

INDI NAIDHA WULANDARI

NIM: 12124004

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

2025

**HALAMAN PERSYARATAN GELAR
TESIS**

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP
PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PESERTA
PEMILIHAN UMUM**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu hukum
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**



**Disusun Oleh:
INDI NAIDHA WULANDARI
NIM: 12124004
PRO PATRIA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DIREVISI

Pada tanggal,.....

Oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H



Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Narotama

PRO PATRIA



Dr. M. Akhul Huda S.H.M.H

TESIS

PADA TANGGAL : 30 JANUARI 2026

TIM PENGUJI TESIS

Ketua :
Dr. NYNDA FATMAWATI O, S.H., M.H., M.Kn.

Anggota :
Dr. MOH. SALEH S.H., M.H

Anggota :
Dr. SUWARDI S.H., M.Hum.



Handwritten signatures of the three members of the thesis review team, corresponding to the names listed on the left.



SURAT PENUGASAN
No.686/NR.FH/03/IX/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM/Prodi	Nama Mahasiswa	Judul Tesis
Dr. Moh.Saleh, S.H., M.H.	12124004/ Magister Hukum	INDI NAIDHA	Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum

Pembimbing yang namanya tercantum diatas, ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul yang dimaksud.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

September 2025



Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. ✎

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis didalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan maka, saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan saksi lain yang diberikan oleh pihak Universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jember, 03 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan



PRO PATRIA
INDI NAIDHA WULANDARI
NIM. 12124004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya dapat memberikan kelancaran dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM” sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penulisan tesis ini ditujukan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar magister (S2) di UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA. Penulis menyadari banyak sekali kekurangan dalam penulisan ini terutama apabila tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang sangatlah berarti dalam menyelesaikan tesis ini.

Dengan rasa hormat, ucapan terima kasih atas peran berbagai pihak yang terlibat dalam kelancaran penyusunan proposal penelitian hukum ini juga penulis ucapkan kepada:

1. Terimakasih kepada ibu dan ayah sebagai pembuka jalan hidupku yang sulit serta selalu rela mendiakan anaknya.
2. Terimakasih kepada diriku sendiri yang telah mampu dan kuat dengan semua permasalahan dalam hidup ini.
3. Dr. Rusdianto Sesuang, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama.

4. Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama
5. Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan sabar meluangkan waktu dan memberikan wawasan dalam membimbing penyusunan penelitian hukum penulis hingga diberikan kelancaran.
6. Seluruh staf Fakultas hukum Universitas Narotama yang telah berperan serta dalam membantu kelancaran administrasi penyusunan Tesis
7. Serta rekan-rekan bimbingan penelitian hukum yang selalu memberikan dukungan dan informasi penting dari awal penyusunan hingga saat ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini. Saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya.

Surabaya, 29 Januari 2026

Indi Naidha Wulandari, S.H

ABSTRACT

The dynamics of election problems are always intertwined with classic problems that have not been solved until now, such as money politics which has lasted for a long time and even lasted as long as the election was carried out directly and elected by the people. The practice of money politics without preventive efforts not only hurts the principles of democracy but also produces corrupt politicians. Bawaslu as an institution that has the authority to oversee the conduct of elections has a vital role that needs to be optimized. However, the position of Bawaslu today does not have a strategic position in supervising the implementation of elections, especially in the gakkumdu center which places Bawaslu in a subordinate position compared to the police and prosecutor's office. Although the authority of Bawaslu has been regulated in Law Number 7 of 2017, there are still limitations to the authority of Bawaslu. The complexity of *money politics* requires an integrated approach by considering the sociological conditions of the community, regulatory reform, and institutional reform. For this reason, this study aims to review the authority of Bawaslu in Law Number 7 of 2017 so that it can be the foundation for the movement of the Bawaslu institution in the future. The method used in this study is qualitative with a normative juridical approach, by examining Law Number 7 of 2017 and the sociological conditions of the community. The results of the study show that regulatory reform is not enough to answer the problem of money politics, but requires an integrative approach to the social conditions of the community and requires comprehensive institutional reform in the body of Bawaslu.

Keywords: Bawaslu's authority, elections, *money politics*

ABSTRAK

Dinamika permasalahan pemilu selalu berkelindan pada masalah-masalah klasik yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan seperti *money politics* yang telah berlangsung lama bahkan berlangsung sepanjang pemilu dijalankan secara langsung dan dipilih oleh rakyat. Praktik *money politics* apabila tanpa adanya upaca pencegahan tidak saja mencederai prinsip demokrasi tetapi menghasilkan politisi yang koruptif. Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan mengawasi jalannya pemilu memiliki peran vital yang perlu dioptimalisasi. Akan tetapi, posisi bawaslu hari ini justru tidak memiliki posisi strategis dalam mengawasi pelaksanaan pemilu terutama pada sentra gakkumdu yang menempatkan bawaslu dalam posisi yang subordinatif dibandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan. Walaupun kewenangan bawaslu telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tetap saja terdapat keterbatasan kewenangan bawaslu. Kompleksitas dari permasalahan *money politics* membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dengan mempertimbangkan kondisi sosiologis masyarakat, reformasi regulasi, dan reformasi lembaga bawaslu. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk meninjau kewenangan bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sehingga memungkinkan menjadi pondasi gerak lembaga bawaslu kedepan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normative, dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan kondisi sosiologi dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi regulasi tidaklah cukup untuk menjawab permasalahan *money politics*, tetapi membutuhkan pendekatan integratif terhadap kondisi sosial masyarakat dan membutuhkan reformasi kelembagaan yang menyeluruh dalam tubuh Bawaslu.

PRO PATRIA

Kata Kunci: Kewenangan bawaslu, Pemilihan umum, *Money politics*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS SEBELUM UJIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS SETELAH UJIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Tinjauan Pustaka.....	13
1.6 Orisinalitas Penelitian.....	25
1.7 Metode Penelitian	29
BAB II : KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM	36
2.1 Tugas dan wewenang bawaslu dalam pencegahan tindak pidana oleh pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum.....	36
2.2 Independensi lembaga pengawas dalam pemilihan umum.....	40
2.3 Sentra gakkumdu sebagai upaya preventif mencegah tindak pidana oleh pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum.....	44
2.4 Praktik tindak Pidana <i>Money Politics</i> oleh pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum.....	46
2.5 Krisis kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu.....	54
BAB III : REFORMULASI KEWENANGAN BAWASLU DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA <i>MONEY POLITIK</i> PADA PEMILIHAN UMUM	57
3.1 Upaya Penguatan Tugas Bawaslu dalam Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Umum di Indonesia	57

	3.2	Integrasi Pendekatan Hukum Normatif dan Sosiologis	66
BAB IV	:	PENUTUP	72
	4.1	Kesimpulan	72
	4.2	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA			76

